

TANTANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KELAS INKLUSI DI SEKOLAH RAMAH ANAK

Alia Tasyarifah, Eriska Humairotuz Zahro, Rachmania Gina Putri Wardani, Deni Zein Tarsidi

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sebelas Maret

aliatasya@student.uns.ac.id, eriskahumairz@student.uns.ac.id,

rachmaniagina@student.uns.ac.id, denizein@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tantangan, faktor penghambat, faktor pendukung, dan solusi efektif yang dapat diterapkan guru pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam kelas inklusi di sekolah ramah anak. Latar belakang penelitian ini didasari adanya ketimpangan jumlah guru pendamping khusus (GPK) dan *shadow teacher* (guru bayangan) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah inklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada partisipasi anak berkebutuhan khusus selama pembelajaran Pendidikan Pancasila dan interaksi bersama guru kelas, GPK, dan *shadow teacher*, serta wawancara mendalam bersama guru kelas dan GPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah sudah memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK), tetapi belum optimal karena kurangnya jumlah GPK dan *shadow teacher* dalam mengelola dan membersamai ABK selama pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila; Inklusi; Sekolah Ramah Anak; dan Tantangan Pembelajaran.

Abstract

This study discusses the challenges, inhibiting factors, supporting factors, and effective solutions that teachers can apply in teaching Pancasila Education in inclusive classrooms in child-friendly schools. The background of this study is based on the imbalance in the number of special assistant teachers (GPK) and shadow teachers in Pancasila Education in inclusive schools. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through observation of the participation of children with special needs during Pancasila Education lessons and interactions with classroom teachers, GPK, and shadow teachers, as well as in-depth interviews with classroom teachers and GPK. The results of the study show that Pancasila Education in schools already meets the needs of children with special needs (ABK), but it is not yet optimal due to the lack of GPK and shadow teachers to manage and accompany ABK during Pancasila Education lessons.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: <i>Pancasila Education; Inclusion; Child-Friendly Schools; and Learning Challenges</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia melalui *Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009*, sekolah diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan bagi semua anak tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus ialah peserta didik dengan keterbatasan intelektual, fisik, emosi, dan sosial (Golden & Petty, 2022). Salah satu bentuk implementasi layanan pendidikan bagi semua anak adalah dengan penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang menempatkan setiap peserta didik, baik reguler maupun berkebutuhan khusus, sebagai subjek pembelajaran yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan belajar secara optimal. Program Sekolah Ramah Anak (SRA) selaras dengan nilai-nilai dasar Pendidikan Pancasila karena menekankan terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan sosial, sehingga mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang humanis dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.

Pendidikan pancasila di era kemajuan dunia yang pesat ini sangat diperlukan untuk menanamkan karakter dan moral seseorang agar tetap dapat menjadi pribadi yang berintegritas dan berlaku sesuai dasar negara Indonesia. (Ruwaidah dkk, 2024) menyatakan hal yang serupa bahwa pendidikan pancasila menjadi urgensi untuk diajarkan oleh karena perlunya pembentukan kepribadian dan perluasan wawasan kebangsaan demi melahirkan generasi bangsa yang berkomitmen pada etika, nilai-nilai moral, dan kesadaran nasional. Sementara itu, terdapat tantangan pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Ramah Anak, salah satunya adalah jumlah asisten guru terlatih (GPK) yang kurang memadai (Sriwahyuni & Kherrmarinah, 2024). Kondisi ini menyebabkan guru kelas harus menangani seluruh kebutuhan belajar peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus yang kekurangan dukungan profesional. Selain itu, perbedaan kognitif pada anak berkebutuhan khusus (ABK) itu sendiri menjadi tantangan utama dalam keberjalanan kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila di SD inklusi.

Pembelajaran pancasila di kelas inklusi ditujukan untuk memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dengan terpenuhinya pendampingan individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui kehadiran Guru Pendamping Khusus dan *shadow teacher* agar setiap peserta didik dapat belajar secara optimal. Namun, realitas pelaksanaan di sekolah menunjukkan bahwa dukungan tersebut belum secara maksimal diwujudkan karena keterbatasan jumlah tenaga pendamping. Dalam implementasinya, pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan guru kelas dalam memberikan pendampingan yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus ketika belajar bersama peserta didik reguler dalam satu kelas (Afifah et al., 2025). Kondisi tersebut diperkuat oleh temuan Rizqianti et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa permasalahan yang banyak dikeluhkan guru adalah kurangnya ketersediaan guru Pendamping Khusus sebesar 27,39%. Dengan demikian, meskipun pendampingan GPK dan *teacher shadow* menjadi komponen penting dalam menjamin pembelajaran inklusif, keterbatasan jumlah tenaga pendidik membuat pelaksanaannya masih jauh dari idealitas yang dituntut oleh kerangka pendidikan inklusif.

Dengan hal ini, diperlukan adanya pembahasan lebih lanjut mengenai tantangan pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas inklusi, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran, dan menyertakan rekomendasi solusi untuk persoalan yang ditemukan pada

penelitian. Pembahasan tersebut menjadi penting untuk menggambarkan secara mendalam terkait bagaimana Pendidikan Pancasila berlangsung dalam lingkungan yang beragam, serta sejauh mana sekolah mampu memenuhi prinsip ramah anak dan inklusivitas. Selain itu, diharapkan dengan melakukan analisis mendalam terhadap tantangan dan faktor pendukung yang ada, akan ada strategi pembelajaran yang lebih fleksibel dan efektif agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan secara adil dan merata pada peserta didik heterogen, termasuk anak berkebutuhan khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh peserta didik di semua jenjang pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Menurut (Lestari & Kurnia, 2022), Pendidikan Pancasila merupakan komponen dari Pendidikan Kewarganegaraan yang berfokus pada penanaman ideologi Pancasila melalui pembelajaran yang kemudian diajarkan kepada anak dengan tujuan menjadikan mereka sebagai warga negara yang berakarakter baik. Hal tersebut dikarenakan Pendidikan Pancasila mengandung nilai-nilai Pancasila dan pesan moral yang dapat dijadikan contoh positif serta dapat melatih kepribadian anak (Nurgiansah, 2021). Dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila, peserta didik tidak sekadar memahami, tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Qondias et al., 2024).

Pendidikan Inklusif

Sekolah inklusif sebagai salah satu strategi pemerataan pendidikan yang bertujuan memastikan terselenggaranya layanan pembelajaran tanpa diskriminasi, baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler, sehingga seluruh anak memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan kelainan, keterbatasan, maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti proses pembelajaran secara berdampingan dengan peserta didik lainnya dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Darma dan Rusyidi (2015) menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan inklusif tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan maupun fasilitas yang bersifat istimewa kepada peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi justru bertujuan memastikan mereka memperoleh hak dan kewajiban yang setara seperti peserta didik lainnya. Program pendidikan inklusi tidak terbatas pada peserta didik berkebutuhan khusus saja, namun bagi seluruh anak, karena pada dasarnya setiap individu memiliki karakteristik, keunikan, dan keberagaman yang secara alami melekat pada dirinya. Perin et al (2021) menjelaskan bahwa sekolah inklusif menerima seluruh peserta didik untuk belajar bersama dikelas reguler, tanpa membedakan kebutuhan pendidikan khusus yang dimiliki. Sejalan dengan itu, Marope (2017) menegaskan bahwa kurikulum dan praktik pembelajaran perlu disesuaikan agar kebutuhan setiap peserta didik terpenuhi, sehingga semua peserta didik mampu menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan.

Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak menjadi salah satu bentuk program pemerintah yang dimasifkan melalui Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. (Fahmi, 2021) menyatakan bahwa dalam Permen PPPA tersebut terkhusus pada pasal 1, dinyatakan bahwa sekolah ramah anak ialah satuan pendidikan non formal, formal, dan informal yang mampu

memberikan jaminan, pemenuhan, dan penghargaan terhadap hak-hak anak, serta memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan maupun perlakuan salah lainnya. Selain itu, konsep Sekolah Ramah Anak juga mendorong anak untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan, perencanaan, pembelajaran, pengawasan, serta penyediaan ruang untuk mengadukan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Konsep SRA merupakan bagian dari prinsip pendidikan yang mengakui bahwa pendidikan yang berkualitas dan berpusat pada anak merupakan bagian dari hak yang perlu didapatkan setiap manusia (Wuryandani dkk, 2018).

METODOLOGI

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan karena data yang akan dihasilkan dalam penelitian ini bukan berupa angka, melainkan data deskriptif. Metode studi kasus digunakan karena memungkinkan penelitian fokus pada satu konteks nyata pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar dengan program pemerintah yaitu inklusi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi observasi dan wawancara pada guru, selanjutnya data dianalisis dengan teknik analisis kondensasi data dan penarikan kesimpulan untuk mengumpulkan data terkait tantangan implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam kelas inklusi di SDN Nayu Barat 1, faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas inklusi SDN Nayu Barat 1, dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas kelas inklusi di SDN Nayu Barat 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya hasil analisis dari data observasi dan wawancara akan disajikan dan dibahas berdasarkan fokus dari penelitian ini, yaitu: (1) Tantangan implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam kelas inklusi; (2) Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam kelas inklusi; dan (3) Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan pembelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas inklusi.

A. Tantangan Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kelas Inklusi di SDN Nayu Barat 1

Perbedaan Kognitif Siswa Reguler dan ABK

Kondisi kelas heterogen yang terdiri atas peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus (ABK) di SDN Nayu Barat 1 merupakan kekuatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak belajar setiap anak. Kondisi ini menjadi faktor penghambat proses pembelajaran yang ideal dan efektif dikarenakan adanya perbedaan kemampuan kognitif antara peserta didik reguler yang pada umumnya memiliki kemampuan belajar lebih cepat dibandingkan dengan peserta didik ABK yang membutuhkan waktu lebih panjang dalam memahami materi. Sehingga fenomena ini menuntut guru untuk dapat melakukan penyesuaian yang tepat. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kelas agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan ideal, efektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh peserta didik di kelas. Hal ini sejalan dengan temuan (Anggreani dkk., 2024) menyatakan bahwa kehadiran anak berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler dapat menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan manajemen Sekolah.

Kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK)

GPK atau Guru pendamping khusus sangat diperlukan di sekolah ramah anak untuk membantu mendampingi dan membimbing anak berkebutuhan khusus di lingkungan pembelajaran reguler. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di SDN Nayu Barat 1 adalah jumlah GPK yang hanya tersedia dua GPK untuk enam kelas. Hal ini menunjukkan jumlah GPK yang tidak ideal dan sangat minim tidak sebanding dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang cukup banyak. Keadaan ini menjadi kendala tersendiri bagi sekolah dan guru dalam memberikan layanan atau pengelolaan bagi anak berkebutuhan khusus sepanjang proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan penambahan GPK yang kompeten serta proporsional dengan kuantitas ABK supaya pendidikan inklusif dapat tercapai dengan efisien dan optimal.

Keterbatasan Waktu

Selain perbedaan karakteristik kognitif dan minimnya guru pendamping khusus (GPK) di SDN Nayu Barat 1 yang menjadi faktor penghambat sekaligus tantangan utama dalam pembelajaran pendidikan pancasila di kelas inklusi, terdapat kendala lain yang dihadapi guru yakni, keterbatasan waktu pembelajaran. Keterbatasan waktu ini berkaitan erat dengan perbedaan kapasitas belajar peserta didik, dikarenakan guru membutuhkan durasi yang lebih panjang untuk memastikan pemahaman yang setara antara peserta didik reguler dengan peserta didik ABK. Upaya guru untuk menyelaraskan tingkat pemahaman seluruh peserta didik sering kali mengakibatkan guru kehabisan waktu yang tersedia. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan tercapainya pemahaman inklusif yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi guru yang handal dalam mengelola kelas untuk dapat mencapai keefektifan proses pembelajaran bagi setiap anak sehingga dapat tercapai pemahaman setara bagi setiap peserta didik.

B. Faktor Pendukung dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas Inklusi SDN Nayu Barat 1**Adanya *Shadow Teacher* dan Guru GPK**

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas Inklusi didukung oleh beberapa kondisi internal sekolah yang berkontribusi terhadap keberlangsungan proses belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Faktor pendukung tersebut meliputi keberadaan *shadow teacher* dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Kedua nya memiliki peranan penting bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa sekolah memiliki dua GPK dan tiga *shadow teacher* dan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus cukup banyak dan berasal dari kebutuhan yang beragam, terutama *slowlearner* dan *ADHD*.

Dalam praktiknya *shadow teacher* memberikan pendampingan individu satu pendamping satu peserta didik. *Shadow teacher* berfokus pada pendampingan individual selama proses pembelajaran berlangsung, terutama bagi peserta didik yang pendampingannya diinisiasi langsung oleh permintaan orang tua. Menurut Sholihah dan Istikomah (2025), kehadiran *shadow teacher* dapat membantu peserta didik inklusif dalam kegiatan pembelajaran terlibat secara aktif. *Shadow teacher* berperan mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam menghadapi hambatan belajar sekaligus mendorong perkembangan potensi yang dimiliki peserta didik melalui pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selain itu, *shadow teacher* menyusun dan menyampaikan catatan capaian perkembangan harian peserta didik berkebutuhan

husus kepada wali murid sebagai bentuk dokumentasi sistematis terhadap proses belajar, perilaku, dan respons anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Wardah (2019) menyebutkan bahwa Guru Pendamping Khusus (GPK) bertanggung jawab dalam menyusun pembelajaran, melakukan asesmen dan menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam pelaksanaannya GPK menyiapkan dan menjalankan program khusus, melakukan identifikasi dan evaluasi serta menyusun PPI. Selain itu, GPK berkolaborasi dengan guru kelas untuk menyusun kurikulum, melakukan pemantauan dan penilaian serta mendampingi perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. GPK juga berperan dalam mengkoordinasikan layanan pembelajaran melalui komunikasi yang berkesinambungan dengan *shadow teacher* dan guru kelas, khususnya terkait identifikasi kendala, dinamika perilaku, serta temuan-temuan spesifik yang ditunjukkan peserta didik berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran berlangsung. Ketika seluruh peran tersebut dijalankan, layanan pendidikan di sekolah Inklusi dapat berjalan dengan optimal.

Lingkungan yang Inklusif

Hasil studi kasus menunjukkan bahwa keberlangsungan pembelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas inklusif didukung oleh lingkungan yang inklusif serta peran guru kelas. Kelas dibangun dengan menanamkan nilai penerimaan terhadap perbedaan sejak awal tahun ajaran baru. Guru menanamkan pemahaman kepada seluruh peserta didik bahwa setiap manusia memiliki karakteristik, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda, sehingga penting bagi peserta didik untuk saling menghargai. Pendekatan ini menghasilkan sikap penerimaan di kelas, dimana peserta didik reguler menunjukkan kemampuan berinteraksi dan belajar bersama peserta didik berkebutuhan khusus tanpa adanya perundungan atau perlakuan diskriminatif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Syaipul Hari Baharuddin et al (2024) menegaskan bahwa pembiasaan sikap saling menghormati dan berempati di lingkungan kelas dapat menciptakan suasana yang harmonis dan inklusif serta mendukung perkembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik.

Keberhasilan tersebut berkaitan dengan peran guru dalam membimbing dan mengelola proses pembelajaran dengan keberagaman kemampuan peserta didik. Guru kelas telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan perilaku, sehingga mampu merancang pendekatan belajar yang sesuai dengan ragam kemampuan peserta didik, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan khusus. Hal tersebut sejalan dengan Afrahamiryano et al. (2022) Guru berperan sebagai fasilitator yang membangun lingkungan kelas inklusif dengan menghargai perbedaan antar peserta didik serta menumbuhkan sikap saling menghormati dalam interaksi sosial di kelas.

C. Solusi dalam Mengatasi Tantangan Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kelas Inklusi SDN Nayu Barat 1

Peningkatan Jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) dan *Shadow Teacher* (Guru Bayangan)

Langkah strategis yang dapat dipertimbangkan oleh SDN Nayu Barat 1 dalam mengimplementasikan pembelajaran Pendidikan Pancasila pada kelas inklusi yaitu dengan meningkatkan jumlah guru Pendamping Khusus (GPK) dan *shadow teacher* (Guru bayangan). GPK menjadi salah satu pondasi penting dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Guru Pendamping Khusus bertugas membantu guru dalam merancang materi Program Pembelajaran Individu (PPI) yang sesuai dengan karakteristik peserta didik inklusi (Ansari et al., 2021). Peningkatan *shadow teacher* juga sama pentingnya dengan GPK, yakni membantu guru kelas dalam membersamai anak inklusi selama pembelajaran karena membutuhkan perhatian yang lebih besar daripada peserta didik pada

umumnya (Sholihah & Istiqomah, 2025). *Shadow teacher* juga bertugas untuk melakukan koordinasi rutin bersama guru kelas terkait penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik inklusi (Wilyanita et al., 2022). Dengan peningkatan jumlah GPK dan *shadow teacher* pada kelas inklusi, sekolah dapat memberikan layanan pembelajaran yang lebih terarah, individual dan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi

Penerapan pembelajaran diferensiasi merupakan langkah yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan belajar anak di kelas inklusi SDN Nayu Barat 1 karena pembelajaran diferensiasi (*differentiated instructions*) adalah salah satu komponen dari Kurikulum Merdeka yang disusun, dilaksanakan dan dievaluasi agar kebutuhan peserta didik terpenuhi, dengan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik (Marantika et al., 2023). Perbedaan karakteristik peserta didik seperti latar belakang sosial, motivasi belajar, gaya belajar, dan kebutuhan belajar mendorong guru untuk mampu memfasilitasi pembelajaran dari peserta didik yang heterogen agar mencapai hasil yang optimal. Hal itu berarti, setiap peserta didik dipastikan mendapatkan kesempatan belajar yang sama yang sesuai bagi mereka. Pada pembelajaran Pendidikan Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memberikan ruang kepada anak berkebutuhan khusus dalam memahami nilai-nilai Pancasila dengan cara yang sesuai bagi mereka. Pembelajaran berdiferensiasi telah di uji coba oleh beberapa peneliti dalam kegiatan pembelajaran pada kurikulum merdeka dan menunjukkan hasil yang efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik (Astria & Kusuma, 2023).

Pelaksanaan Evaluasi Berkala bersama Orang Tua

Upaya selanjutnya dalam mengatasi tantangan penerapan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam kelas inklusi yaitu dengan melaksanakan evaluasi secara berkala bersama orang tua. Melalui pertemuan rutin yang dilakukan guru kelas, GPK, *shadow teacher*, dan orang tua dapat bersama-sama memantau perkembangan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Dengan kolaborasi ini, guru mampu mempelajari informasi lebih banyak terkait kebutuhan peserta didik inklusi di rumah, serta memperkuat konsistensi pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Bagi GPK, program ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan pendidikan di lingkup pendidikan anak inklusi (Barlian et al., 2023). Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan mampu menjadikan pembelajaran Pendidikan Pancasila lebih adaptif dan tepat sasaran terhadap kebutuhan peserta didik di kelas inklusi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah informasi yang didapatkan dari studi literatur, wawancara, dan observasi, dapat diketahui bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar memiliki posisi krusial dalam menanamkan nilai-nilai nasionalis, kemanusiaan, dan moral kepada seluruh peserta didik, khususnya di sekolah inklusi atau ramah anak. Implementasi pembelajaran yang inklusif menjadi upaya penting dalam memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan belajar dalam lingkungan yang humanis, aman, dan tanpa diskriminasi sesuai prinsip sekolah ramah anak. Akan tetapi, fakta yang terjadi pada penerapan pembelajaran di kelas inklusi ialah masih terdapat tantangan, di antaranya keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK), perbedaan kemampuan kognitif antara peserta didik reguler dan ABK, serta keterbatasan waktu pembelajaran untuk dapat

mengakomodasi seluruh rangkaian kegiatan dan kebutuhan belajar peserta didik. Meskipun terdapat sejumlah hambatan dalam proses pembelajaran, tetapi terdapat faktor pendukung yang memperkuat layanan pembelajaran seperti dengan adanya GPK, *shadow teacher*, kebijakan pendidikan inklusif, dan penerapan Kurikulum Merdeka.

Menyikapi hambatan dan kondisi yang terjadi, penulis menawarkan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan guna mengoptimalkan pendidikan pancasila di Sekolah Dasar Ramah Anak. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penambahan GPK yang disesuaikan dengan jumlah ABK, penambahan *shadow teacher* oleh wali murid pada anaknya yang memerlukan pendampingan khusus yang lebih intens, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan pelaksanaan evaluasi berkala bersama orang tua untuk memonitoring dan mengevaluasi bersama perkembangan anak serta layanan atau perlakuan yang telah diberikan. Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas inklusi dapat berjalan lebih efektif apabila didukung oleh kolaborasi antara guru, orang tua, kebijakan sekolah, serta desain pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada anak. Secara keseluruhan, keberhasilan pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam konteks inklusif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru, tetapi juga oleh sistem pendukung yang mampu menjamin terpenuhinya prinsip inklusivitas dan ramah anak bagi seluruh peserta didik.

Referensi

- Afifah, M. F., Fatmasari, E. D., Annisa, I. D., & Minsih, M. (2025). Peran Shadow Teacher Dalam Mengoptimalkan Pembelajaran Pada Peserta Didik Slow Learner di Sekolah Inklusif. *Jurnal Elementary: Kajian Teori dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar*, 7(1), 32-38.
- Afrahmiryano, A., Dasna, I. W., & Habiddin, H. (2022). Tinjauan Sistematis tentang Collaborative Learning pada Bidang Kimia. *Edukimia*, 4(3), 131-150. <https://doi.org/10.24036/ekj.v4.i3.a432>
- Anggreani, K., Tafsira, N. A., Febriyani, T., & Syafitri, E. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar: Tantangan Dan Strategi Efektif. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 1(2), 199-204.
- Ansari, M. I., Barsihanor, B., & Nirmala, N. (2021). Peran Guru Pendamping Khusus Dalam Mengembangkan Emosional Anak Autisme di Kelas 1 A SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 21-36.
- Aryani, N., & Wilyanita, N. (2022). Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Terintegrasi Pembelajaran untuk Menanamkan Nilai-nilai Toleransi Sejak Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4653-4660.
- Astria, R., & Kusuma, A. B. (2023). Analisis pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. *Proximal: Jurnal Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 6(2), 112-119.
- Barlian, U. C., Wulandari, R. P., Said, M., & Brilianti, N. L. (2023). Peran Guru Kelas Dan Guru Pendamping Khusus Dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan Inklusi Di TK Ibnu Sina. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), 623-634.
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 147-300.
- Fahmi, A. (2021). Implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 9(1), 33-41.
- Golden, R. N., & Petty, E. M. (2022). Learners With Disabilities: An Important Component of Diversity, Equity, and Inclusion in Medical Education. *Academic Medicine*, 97(3), 328-

- Marantika, J. E., Tomasouw, J., & Wenno, E. C. (2023). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. *German Für Gesellschaft (J-Gefüge)*, 2(1), 1-8.
- Marope, P. T. M. (2017). Advancing inclusive and quality education through human rights education. In *Prospects* (Vol. 47, Issues 1-2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11125-018-9430-4>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter jujur. *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan undiksha*, 9(1), 33-41.
- Perrin, A. L., Jury, M., & Desombre, C. (2021). Are teachers' personal values related to their attitudes toward inclusive education? A correlational study correlational study. *Social Psychology of Education*, 24(4), 1085-1104. <https://doi.org/10.1007/s11218-021-09646-7>
- Qondias, D., Dhiu, K. D., Ngura, E. T., Una, L. M. W., Beku, V. Y., & Menge, W. (2024). Penguatan Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar Melalui Pendampingan Media Pembelajaran Diferensiasi. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 5(4), 1124-1138.
- Rizqianti, N. A., Ningsih, P. K., Ediyanto, & Sunandar, A. (2022). Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus Serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1), 67- 75.
- Ruwaidah, A. I. S., Salsabil, A. M., Safitri, A., Hanapih, F. N., Khotimah, H. H., Aulia, N. F., ... & Furnamasari, Y. F. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter dan Berwawasan Kebangsaan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 2696-2704.
- Sholihah, N., & Istikomah, I. (2025). Peran Shadow Teacher dalam Mendampingi Siswa Inklusi di Sekolah Dasar. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 2848-2855.
- Sriwahyuni, Eci, and Khermarinah. (2024) "A program for inclusive education towards equitable and non-discriminatory education." *Journal of Social Work and Science Edu-cation* 5.1 : 307-318.
- Syaipul Hari Baharuddin, Shandy Satiron, Gilang Permana, C. (2024). Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar : A Systematic Review. 8, 113-132. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/10606/8111>
- Wardah, E. Y. (2019). Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non- Pendidikan Luar Biasa (Plb) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 2(2), 93. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v2n2.p93-108>.
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86-94.